

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Gambaran Kesiapan dan Keseriusan Kampus**

##### **Menata Budaya Mutu**

Sehubungan dengan upaya menggambarkan realitas menghidupkan gerakan kampus budaya mutu, fokus penajaman data untuk kebutuhan tersebut difokuskan pada kampus STAKN Toraja, dan dua IAKN yakni IAKN Ambon dan Manado. Meskipun tiga kampus yang menjadi fokus pengkajian riset, namun data sehubungan dengan fokus penelitian ini juga mengakomodir dari semua STAKN dan IAKN yang ada, sehingga orientasi data bersifat menyeluruh.

Terkait dengan kesiapan dan keseriusan dalam menata kampus budaya mutu, analisis data dilakukan merujuk pada pengakuan semua pimpinan PTKKN yang menegaskan bahwa pada prinsipnya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak bergerak maju menuju kampus budaya mutu, bahkan budaya mutu menjadi fondasi bagi terlaksananya perbaikan mutu di berbagai hal sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi lingkungan kampus yang kondusif bagi dinamika pembelajaran dan pengembangan SDM.<sup>13</sup>

Sejalan dengan itu, penegasan tentang telah terlaksananya upaya membangun kampus budaya mutu, dalam hal pelaksanaan SPMI dan AMI, Semua Rektor baik IAKN Ambon, Manado dan Tarutung juga Ketua STAKN yakni, STAKN Sentani, STAKN Kupang, STAKN Palangkaraya, dan STAKN Toraja, menegaskan hal yang sama bahwa

---

<sup>13</sup>Wawancara bersama para Ketua dan Rektor/wakil rektor PTKKN bertempat di hotel Horison Bekasi, dalam sebuah kegiatan pembuatan standar nasional penyelenggaraan Mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Pada tgl. 3-4 November 2018.

kampus yang sedang dalam kepemimpinannya, kondisinya sedang dan terus berupaya menyelesaikan segala hal menyangkut kebutuhan pelaksanaan SPMI dan AMI, baik menyangkut softskill maupun hardskillnya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keperluan SPMI dan AMI, hal mendasar yang disampaikan bahwa, kesadaran mengenai tuntutan regulasi dan undang-undang pendidikan tinggi harus dipenuhi, sebagaimana standar yang telah ditetapkan Pemerintah yakni PP No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri dari 24 standar yang terbagi dalam tiga komponen yakni standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Masing-masing komponen tersebut memiliki delapan standar turunan, seperti untuk standar nasional pendidikan yakni: standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran. Standar nasional Penelitian, a. standar hasil penelitian; b. standar isi penelitian; c. standar proses penelitian; d. standar penilaian penelitian; e. standar peneliti; f. standar sarana dan prasarana penelitian; g. standar pengelolaan penelitian; dan h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yakni; standar hasil pengabdian kepada masyarakat; b. standar isi pengabdian kepada masyarakat; c. standar proses pengabdian kepada masyarakat; d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.<sup>14</sup> Terkait dengan berbagai

---

<sup>14</sup>Analisis yang penulis lakukan bersumber dari Informasi dari para Rektor IAKN dan Ketua STAKN, wawancara berlangsung kegiatan pertemuan para pimpinan PTKKN se Indonesia yang

upaya dalam memenuhi tuntutan terlaksananya SPMI yang mengacu pada 24 standar tersebut, berbagai hal dilakukan oleh pihak kampus, seperti mengadakan pelatihan atau lokakarya terkait dengan SPMI, serta membentuk tim khusus menindaklanjuti pembuatan kebijakan mutu, standar mutu, prosedur mutu/manual mutu dan berbagai formulir terkait dengan proses Audit Mutu Internal (AMI). Beberapa kampus seperti IAKN Ambon dan STAKN Toraja bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada dalam mengembangkan seluruh perangkat SPMI dan AMI, baik melalui in house training, juga menjadi Perguruan Tinggi Asuh dalam hal memantau pengembangan dan peningkatan layanan kampus budaya mutu.<sup>15</sup> IAKN Ambon sebelum berubah menjadi IAKN, telah melakukan upaya pemenuhan tuntutan pelaksanaan SPMI dan AMI dengan melakukan perbaikan standar mutu sebagaimana ditetapkan berdasarkan SNPT dengan mempercayakan kepada penjaminan mutu internal bersama tim melakukan studi banding serta magang dalam beberapa waktu di Universitas Gajah Mada untuk mengerjakan sistem penjaminan mutu internal dan berbagai ketentuan berdasarkan regulasi dalam melaksanakan audit mutu internal.<sup>16</sup> Kampus-kampus lain dalam lingkup PTKKN juga melakukan hal yang sama, berdasarkan informasi dari Rektor dan Ketua, mereka terus berbenah dengan berbagai upaya seperti mengundang tenaga ahli dari DIKTI pun dari berbagai Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan seputar peningkatan SDM dalam hal penjaminan mutu melalui pelaksanaan SPMI dan AMI. Hal terkait juga dikeijakan yakni mengikuti kegiatan deseminasi SPMI yang dilaksnakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti. Kegiatan-kegiatan terkait tersebut terus ditindaklanjuti berupa menetapkan

---

bertempat di hotel Horison Bekasi, dalam sebuah kegiatan pembuatan standar nasional penyelenggaraan Mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Pada tgl. 3-4 November 2018. Juga berlangsung pada kegiatan Forum Pimpinan PTKKN yang berlangsung di Ambon, yakni di hotel Mutiara Ambon pada dalam kegiatan fnalisisasi system Seleksi Nasional PTKKN tahun 2018.

<sup>15</sup>Informasi dari Wakil Ketua I STAKPN Ambon Ibu Agustina Sihaya sebelum berubah status menjadi IAKN, menegaskan bahwa, kejasama dengan UGM menjadi upaya perbaikan system penjaminan mutu, mengacu pada penetapan kebijakan, Standard dan prosedur mutu berbasis outcome based leaming. STAKN Toraja juga melakukan kerjasama dengan UGM berupa kegiatan inhouse training yang sudah berlangsung -25-28 September 2018, yang menghasilkan draf SPMI dan AMI yang akan ditindaklanjuti sert diterapkan semester genap 2018.

<sup>16</sup>Ibid.

arah kebijakan mutu, yang didukung dengan standar mutu yang berorientasi pada prosedur mutu yang didasarkan pada kebutuhan internal dan kebutuhan stakeholder. Sehubungan dengan upaya pemenuhan tuntutan pelaksanaan yang menjawab kebutuhan internal dan eksternal dan tuntutan IPTEKS maka 3 kampus IAKN dalam lingkup PTKKN tersebut telah kembali melakukan pengkajian dan penetapan arah dan kebijakan mutu standar mutu dan prosedur mutu menyesuaikan dengan peralihan lembaga dari STAKN/STAKPN menjadi IAKN.<sup>17</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, BAN-PT dalam hal ini diwakili oleh Dewan Direksi yakni Bapak Sugiono menegaskan bahwa, BAN-PT telah melakukan perbaikan instrumen akreditasi. Berdasarkan Permenristekdikti No 32/2016 dan Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT telah mengembangkan Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) versi 2018, yang secara singkat ditulis IAPT 3.0 (IAPT 1.0 (2006); IAPT 2.0 (2011)). IAPT 3.0 menggunakan 9 Kriteria yaitu: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 3. Mahasiswa 4. Sumber Daya Manusia 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana 6. Pendidikan 7. Penelitian 8. Pengabdian kepada Masyarakat 9. Luaran dan Capaian Tridharma. Hal yang sama juga mengalami perubahan yakni pada akreditasi program studi, Sesuai dengan Permenristekdikti No 32/2016, BAN-PT mengembangkan instrumen akreditasi yang relevan dengan pengembangan sektor pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti perkembangan global. IAPS 4.0 juga menggunakan 9 Kriteria sebagai berikut. 1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 3) Mahasiswa 4) Sumber Daya Manusia 5) Keuangan, Sarana dan Prasarana 6) Pendidikan 7) Penelitian 8) Pengabdian kepada Masyarakat 9) Luaran dan Capaian

---

<sup>17</sup>Informasi dari para Rektor dan penjaminan mutu internal. Andre Simatau dalam kapasitasnya sebagai sekretaris Pusat penjaminan mutu IAKN Ambon menegaskan bahwa perubahan SPMI dan AMI dikerjakan mengikuti perubahan lembaga menjadi IAKN. Sehingga sistem mutu harus mengikuti keutuhan layanan lembaga yang baru tersebut.

Tridharma Yang secara keseluruhan mengukur tingkat ketercapaian dan/atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. IAPS 4.0 berorientasi pada output dan outcome. Pengukuran mutu lebih dititikberatkan pada aspek proses, output dan outcome, sementara instrumen sebelumnya lebih banyak mengukur aspek input<sup>18</sup>

Menjawab pergumulan sehubungan dengan SPME dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi, setiap lembaga baik IAKN juga STAKN sudah menjalani proses akreditasi dengan kondisi sebagian besar Perguruan Tinggi masih berperingkat C, hanya Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon dengan SK Akreditasi no. 1220/SKZBAN-PT/Akred/PT/XI/2015 mendapat akreditasi B, dan masih berlaku sampai tahun 2019. Berdasarkan informasi<sup>19</sup> setiap lembaga dalam lingkup PTKKN saat ini sedang dalam upaya reakreditasi baik AIP juga APS sebelum pelaksanaan instrumen terbaru diberlakukan oleh BAN-PT. Alasan mendasar sehubungan dengan hal tersebut adalah belum pemahannya dan belum tersedianya sdm juga terkait pemberian layanan mutu/pelaksanaan mutu yang menjamin terbangunnya outcome based education bagi luaran yang berdampak nyata dalam keilmuan mereka ditengah-tengah masyarakat. Menyangkut tersedianya sarana prasarana, setiap kampus dalam lingkup PTKKN mendapatkan fasilitas cukup memadai dari pemerintah sehingga upaya-upaya perbaikan senantiasa dikerjakan, baik menyangkut penyiapan gedung perkuliahan,

---

<sup>18</sup>Bandingkan dengan surat edaran BAN-PT, juga berdasarkan informasi dari Dewan Eksekutif (DE) Ban-PT bapak Sigiono sehubungan dengan kegiatan bimas Kristen dalam rangka peningkatan standar mutu PT di dalam lingkup PTKKN di hotel Horison Bekasi. Juga informasi terkait bersumber dari Tim Akreditasi BAN-PT, Bapak Prastawa Budi, KepalaLPM UNHAS, dalam kesempatan menjadi nara sumber dalam kegiatan lokakarya instrumen Baru APS di STAKN Toraja tgl 5 November 2018.

<sup>19</sup> dari para Rektor IAKN dan Ketua STAKN, wawancara berlangsung kegiatan pertemuan para pimpinan PTKKN se Indonesia yang bertempat di hotel Horison Bekasi, dalam sebuah kegiatan pembuatan standar nasional penyelenggaraan Mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Pada tgl. 3-4 November 2018. Juga berlangsung pada kegiatan Forum Pimpinan PTKKN yang berlangsung di Ambon, yakni di hotel Mutiara Ambon pada dalam kegiatan finalisasi system Seleksi Nasional PTKKN tahun 2018.

kenyamanan kelas dan suasana akademik, pengembangan SDM baik tenaga dosen dan tenaga kependidikan, akses informasi yang memenuhi tuntutan sistem informasi elektronik berbasis e-campus atau SIAKAD masih dalam pergumulan pembangunannya, juga menyangkut upaya pengembangan layanan kemahasiswaan.<sup>20</sup>

Berbagai keadaan yang menegaskan bahwa setiap kampus dalam PTKKN serius menggumuli tanggung jawab membangun kampus budaya mutu. Hal itu terbukti dengan secara terus menerus menindaklanjuti proses SPME dari BAN-PT. Sebagai bagian dari Asesor BAN-PT, dalam kesempatan melakukan visitasi untuk asesmen lapangan di STAKN Kupang, telah ada upaya serius mengerjakan proses adaptasi berbagai tuntutan memenuhi layanan kampus bermutu, baik menyangkut administrasi, kemahasiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan, juga terkait dengan dinamika pembelajaran/perkuliahannya serta sarana prasarana. Memang secara mendasar sama halnya dengan STAKN lainnya, STAKN Kupang juga belum maksimal dan secara menyeluruh menerapkan SPMI dan AMI, namun dalam beberapa kesempatan bertemu dengan ketua STAKN menjelaskan bahwa kendala yang ada justru terletak pada keseriusan dan kesiapan untuk menerapkannya, dukungan SDM dan fasilitas memungkinkan pelaksanaan SPMI dan AMI sebagai dasar pelaksanaan kampus budaya mutu dapat berjalan dengan baik. Memang kendala kesepahaman dan komitmen masih menjadi titik lemah.<sup>21</sup> Demikian juga halnya dengan IAKN Tarutung, Manado, dan

---

<sup>20</sup>Argumentasi bersumber dari hasil diskusi bersama dengan para pimpinan IAKN dan STAKN dalam kegiatan bersama pimpinan PTKKN se Indonesia yang bertempat di hotel Horison Bekasi, dalam sebuah kegiatan pembuatan standar nasional penyelenggaraan Mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Pada tgl. 3-4 November 2018. Juga berlangsung pada kegiatan Forum Pimpinan PTKKN yang berlangsung di Ambon, yakni di hotel Mutiara Ambon pada dalam kegiatan finalisasi system Seleksi Nasional PTKKN tahun 2018.

<sup>21</sup>Wawancara bersama dengan Bapak Harun, ketua STAKN Kupang di di hotel Horison Bekasi, dalam sebuah kegiatan pembuatan standar nasional penyelenggaraan Mutu pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Pada tgl. 3-4 November 2018

STAKN Palangkaraya dan Sentani, dalam kesempatan yang sama, pun menegaskan bahwa secara proses telah dan sedang mengupayakan perbaikan sistem mutu dan berdasarkan pembekalan dari berbagai kegiatan mereka semestara mencoba untuk menerapkan tahap demi tahap, secara khusus dalam prinsip monitoring dan evaluasi perkualiahan.

Berdasarkan observasi dalam lingkup Kampus STAKN Toraja, kondisi riil yang ada bahwa proses reakreditasi sedang dikeijakan.<sup>22</sup> Dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu, lembaga ini telah memberi perhatian mendasar dalam menyelenggarakan keutuhan tuntutan tridharma perguruan tinggi. Upaya-upaya terkait masih terpusat pada upaya penetapan arah kebijakan mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan hal itu telah sejak 2010 disusun berupa SOP, hanya saja pelaksanaannya belum tertata dengan baik, berbagai kegiatan dilakukan untuk kembali merevisi SOP tersebut, baik SOP lembaga juga SOP Program studi, namun masih tetap terkedala dalam hal pelaksanaannya. Pelaksanaan penjaminan mutu yang didasarkan SOP belum bejjalan sebagaimana yang diharapkan. Masing-masing berjalan berdasarkan ketentuan j/ang belum prosedural. Hal ini dianggap sebagai belum tersosialisasinya SOP secara menyeluruh dan terkendali dalam kesiapan bersama untuk melaksanakannya.

Berdasarkan tuntutan pelaksanaan kampus budaya mutu, maka sejak tahun 2016 SPMI STAKN Toraja telah disusun dalam pertanggungjawaban Pusat Penjaminan Mutu STAKN Toraja, dengan rencana pelaksanaannya pada tahun 2017. Pada tahun akademik 2017/2018 pelaksanaan SPMI masih terkendala. Hal mendasar yang teijadi adalah

---

<sup>22</sup>“Ketua STAKN Toraja telah menegaskan bahwa untuk semua prodi yang masih terakreditasi C dan yang belum terakreditasi, harus segera mengusulkan reakreditasi tahun 2018. Dalam pemantauan Pusat penjaminan mutu juga dalam program pendampingan, 3 prodi baru yakni Prodi misiologi, pastoral konseling dan music gerejawi siap melakukan rekareiditasi untuk tahapan submit ke SAPTO, dengan harapan tahun 2019 sudah terakreditasi. Pascasarjana untuk program doctoral sedang dalam tahap persiapan penyelesaian borang.

belum sepehamnya seluruh civitas akademika memahami dan menentukan standar mutu yang akan diberlakukan secara kelembagaan menyangkut layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merujuk SNPT dan SINDIKTI.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, merujuk pada realisasi akreditasi PT, yang secara rata-rata masih menunjukkan bahwa sistem penataan dan pelaksanaan perguruan tinggi keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) masih terkendala karena realisasi peringkat akreditasi kebanyakan C, juga terkait dengan kesiapan dan penerapan SPMI dan AMI. Merujuk data yang dipublis Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, pada pelaporan pelaksanaan SPMI dan AMI, terlapor bahwa hanya IAKN Ambon yang tercatat telah melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Hal ini menegaskan bahwa, orientasi kesiapan dan keseriusan menata kampus budaya mutu masih terkendala, kendala utama adalah pada proses penetapan dan pelaksanaan SPMI, sehingga menghambat proses AMI terlaksana dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa semangat untuk meningkatkan mutu akademik dan layanan pendidikan bermutu masih berproses pada hal-hal yang bersifat teknis dan administratif, sehingga dalam hal konten, atau pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan baik khusus dan umum sebagaimana tuntutan capaian pembelajaran berbasis KKNI tentu belum terbangun secara kondusif dalam suasana akademik yang baik. Dalam hal ini, Kesiapan dan keseriusan dalam menata kampus budaya mutu, masih mendapat tantangan berupa kebersamaan/komitmen bersama untuk bergerak pada layanan mutu pendidikan dari orientasi input dan proses menuju pada berorientasi hasil atau output dan outcome.

### **Realisasi Kampus Budaya Mutu: Pelaksanaan SPMI dan AMI**

Sebagaimana pemaparan hasil penelitian sehubungan dengan kesiapan kampus menata budaya mutu yang tersaji sebelumnya, yang menegaskan bahwa, belum

terbangunnya “rel” budaya mutu yang tersistem dan terkordinir secara menyeluruh menjawab tuntutan kampus budaya mutu di kalangan STAKN dan IAK.N menjadi indikator bahwa realisasi kampus budaya mutu belum didasarkan pada realisasi pelaksanaan SPMI dan AMI. Dinamika kampus budaya mutu saat ini masih berorientasi lebih kuat pada pelaksanaan SPME yang dilaksanakan oleh BAN-PT. Padahal jika merujuk pada ketetapan SNPT-SNDIKTI, bahwa realisasi SPME terkait erat dengan realisasi SPMI yang dikuatkan dengan pelaksanaan AMI, sehingga baik prodi maupun Perguruan Tinggi tidak lagi kuatir dan terbebani dengan proses SPME. Apalagi berdasarkan informasi dalam kegiatan deseminasi SPMI<sup>23</sup> oleh narasumber yakni Gentur Sutapa dari UGM menegaskan bahwa, realisasi SPME berlangsung apabila kampus pengusul telah melaksanakan proses SPMI melalui AMI yang hasilnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti.

Pada kenyataannya, realisasi penjaminan mutu kuat sekali berorientasi pada SPME berupa Akreditasi dari BAN-PT, bahkan diberi prioritas besar pada penyusunan borang akreditasi baik Perguruan Tinggi juga Program Studi, dan hal ini dilalui secara sadar dan terbebani oleh setiap kampus dalam lingkup PTKKN. Momok akreditasi terus berkelanjutan pun ketika beberapa kampus seperti STAKN Kupang, untuk beberapa prodi kembali mendapat peringkat C dalam proses reakreditasi, juga STAKN Palangkaraya.<sup>24</sup> STAKN Toraja “masih beruntung” sudah mendapatkan peringkat B untuk tiga Prodi yang masuk dalam proses reakreditasi. Meskipun dalam pengamatan

---

<sup>23</sup>Informasi bersumber dari Peneliti mengikuti kegiatan deseminasi SPMI yang dilaksanakan oleh UIN Allaudin Makassar, pada bulan April 2018. Juga terkait pada kegiatan Inhouse Training yang diadakan P2M STAKN Toraja pada bulan September 2018.

<sup>24</sup>Dalam proses akreditasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap Prodi Musik Gerejawi STAKN Kupang, juga terhadap Prodi PAK STAKN Palangkaraya masih bertahan di peringkat C. Memang pro kontra sehubungan dengan hasil tersebut, namun prinsip kerja asesor BAN-PT dapat dipertanggungjawabkan integritasnya.

peneliti sebagai asesor, untuk proses reakreditasi kedepan pun masih belum menegaskan perubahan yang signifikan pada sistem penjaminan mutu dan pengembangan kampus budaya mutu apalagi untuk memenuhi tuntutan instrumen baru menuju layanan kampus berbasis *outcome based education*. Kondisi ini memunculkan semacam kekuatiran, namun tetap belum mampu meningkatkan layanan SPMI dan AMI sebagai pijakan utama dalam mencapai hasil yang semestinya dan sejujurnya sebuah peringkat akreditasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.<sup>25</sup>

Merujuk upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti menegaskan sebagaimana dalam sebuah kegiatan deseminasi SPMI yang peneliti ikuti, bahwa membangun budaya mutu atau *quality culture* di perguruan tinggi perlu rencana dan tahapan yang jelas. Kejelasan dimulai dari langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam hal kebijakan, manual, standar yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan berbagai formulir yang didokumentasikan dalam Dokumen SPMI. Demikian pada mulanya tahapan membangun budaya mutu melalui penerapan SPMI, tidak berhenti hanya pada menyusun dokumen SPMI belaka namun justru penerapannya yang harus ditekankan dengan harapan hasilnya berdampak pada peningkatan budaya mutu pendidikan tinggi.<sup>26</sup>

Berdasarkan diskusi bersama baik dalam lingkup kampus STAKN Toraja juga bersama-sama para pemimpin dan pengambil kebijakan di kampus dalam lingkup

---

“Hasil pengamatan dalam rangka persiapan akreditasi dan penyusunan borong akreditasi di kampus STAKN Toraja, juga saat berkesempatan visitasi untuk asesmen lapangan dalam proses akreditasi yang cenderung sangat sulit memenuhi tuntutan berbagai standar yang ditetapkan, sehubungan dengan bukti-bukti fisik terkait penyelenggaraan pendidikan bermutu.

“Informasi bersumber dari Peneliti mengikuti kegiatan deseminasi SPMI yang dilaksanakan oleh UIN Allaudin Makassar, pada bulan April 2018. Juga terkait pada kegiatan Inhouse Training yang diadakan P2M STAKN Toraja pada bulan September 2018

PTKKN, ditemukan bahwa, membangun budaya mutu yang selama ini dikerjakan meskipun belum dikenal istilah budaya mutu, setiap kampus telah melaksanakan reformasi birokrasi, namun pengaruhnya belum jelas, juga prinsip-prinsip kerja yang dihasilkan dari kegiatan reformasi berokrasi lebih dominan pada pertanggungjawaban admisnistrasi belum menyentuh pertanggungjawaban moral dan integeritas seluruh pelaku pendidikan sehingga gaungnya belum begitu kuat menentukan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang terlihat dari kualitas SDM, kualitas layanan perkuliahan dan kualitas luaran.<sup>27</sup> Sehubungan dengan membangun budaya mutu yang terkait dengan pelaksanaan SPMI dan AMI, maka keberadaanya sedang digumuli untuk segera ditindaklanjuti berupa penerapan SPMI dan AMI. Secara sadar bahwa semua Perguruan Tinggi dalam lingkup PTKKN mengakui bahwa hanya dibutuhkan komitmen bersama, namun komitmen bersama itulah jugalah yang sangat sulit dibangun.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data terhadap kegiatan wawancara dan observasi baik langsung maupun tidak langsung, dapat ditegaskan bahwa realisasi SPMI dan AMI sebagai rujukan mendasar untuk menyelenggarakan kampus budaya mutu sampai saat ini masih terkendala, secara umum kendala yang ada adalah kurangnya daya dukung SDM juga kebijakan terpusat terkait dengan hal ini, yakni dari Bimas Kristen Kementerian Agama RI, yakni dalam bentuk upaya-upaya yang mendukung terbangunnya kesiapan penerapan SPMI. Juga menyangkut lemahnya sosialisasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga kesalahan strategi pengelolaan organisasi dalam menata Perguruan Tinggi membangun budaya mutu. Hal

---

<sup>27</sup>Argumentasi bersumber dari hasil diskusi bersama dengan para pimpinan IAKN dan STAKN dalam kegiatan bersama pimpinan PTKKN se Indonesia yang bertempat di hotel Horison Bekasi, dalam sebuah kegiatan pembuatan standar nasional penyelenggaraan Mutu pendidikan tinggi keagamaan Knsten yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Pada tgl. 3-4 November 2018. Juga berlangsung pada kegiatan Forum Pimpinan PTKKN yang berlangsung di Ambon, yakni di hotel Mutiara Ambon pada dalam kegiatan finalisasi system Seleksi Nasional PTKKN tahun 2018

lainnya yang juga masih bersifat umum adalah adanya sikap dan pendapat bahwa pimpinanlah yang bertanggung jawab mutlak dengan peningkatan mutu, baik untuk menjamin, meningkatkan, dan membudayakan mutu dalam tanggungjawab pimpinan atau para pejabat struktural, bukan pada setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal-hal khusus yang juga ada di setiap STAKN dan IAKN adalah kelemahan dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual SPMI, termasuk kelemahan dalam perumusan indikator Sasaran keberhasilan yang terukur serta yang sangat dialami adalah ketidak-siapannya sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi.

Disamping itu ada hal yang lebih mendasar yakni kurangnya kebersamaan dalam membangun sebuah budaya mutu mengingat seluruh perguruan tinggi dalam lingkup PTKKN masih menggumuli hal tersebut. Lemahnya komitmen dari otoritas institusi Perguruan tinggi dalam lingkup PTKKN menjadi kendala besar dalam mengelola/membangun komitmen bersama. Hal itu disebabkan juga karena lemahnya dasar hukum untuk menjamin legalitas pelaksanaan SPMI-PT dengan tingkat kepercayaan yang sangat kecil bagi Pusat Penjaminan Mutu internal dalam mengelola sistem mutu yang ada, juga dengan gaya kepemimpinan yang kurang optimal, Meskipun dalam status Perguruan Tinggi Negeri, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM juga menjadi kendala yang ada. Kekurang-kompakan menjadi kendala akut, yakni ketidakpedulian dari para pemangku kepentingan internal tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan cenderung dan memang terjadi upaya-upaya penolakan, budaya penolakan yang kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu, dalam kepentingan masing-masing unsur terkait. Hal ini terbukti dari begitu sulitnya menetapkan standar mutu dan prosedur mutu, hampir di semua STAKN dan IAKN.

## **Menjawab Pergumulan *Outcome Based Education*:**

### **Sisi Kekuatan dan Kelemahan dalam Siklus PPEPP/PDCA**

Secara mendasar, untuk menjawab pergumulan *Outcome Based Education* yang mengukur sisi kekuatan dan kelemahan siklus PPEPP/PDCA, tentu akan sangat sulit terukur apabila kampus belum menerapkan SPMI dan AMI, berdasarkan kegiatan AMI yakni Audit Mutu Internal yang merujuk pada SPMI, maka akan diketahui realisasi PPEPP atau bisa menggunakan PDCA. Umumnya siklus PPEPP yang digunakan dalam SPMI. Siklus ini teralisasi sejak awal disepakati untuk melaksanakan SPMI, mulai dari Penetapan standar mutu, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

Umumnya semua STAKN dan IAKN telah berproses dalam menetapkan kebutuhan kebutuhan vital penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Kristen mengacu pada visi misi masing-masing, namun berdasarkan pemantauan, IAKN Ambon telah melaporkan SPMI nya Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, sehingga telah ada upaya melaksanakan SPMI dan AMI. Kondisi yang ada sekarang adalah IAKN Ambon sedang memperbaiki SPMI terkait dengan perubahan dari STAKPN menjadi IAKN, demikian juga IAKN Tarutung dan IAKN Manado.

Pelaksanaan SPMI harus diikuti dengan dilaksanakannya AMI, AMI masuk dalam kategori Evaluasi untuk menjadi data pendukung bagi terlaksananya upaya pengendalian dan peningkatan. Untuk pelaksanaan SPMI dan AMI. Sama halnya dengan STAKN lainnya, STAKN Toraja belum melaksanakan, namun dalam semester ini telah dirampungkan draf akhir SPMI yang akan diplenokan serta diberlakukan semester depan 2018/2019, yang sekaligus pelaksanaan AMI. Berdasarkan pelatihan dalam kerjasama dengan UGM, STAKN Toraja sudah memiliki sebanyak 19 Auditor internal yang akan menyelenggarakan AMI. Hal inilah yang menjadi prioritas pembenahan sampai saat ini di kampus dalam lingkup PTKKN.

Sehubungan dengan prinsip pembangunan kampus budaya mutu yang outcome based education, tentu hal ini menjadi tantangan ke depan dan terus menjadi pergumulan STAKN dan IAKN mengingat bahwa telah sekian lama orientasi penyelenggaraan pendidikan tinggi hanya terkonsentrasi pada masalah input dan proses, meskipun sudah berorientasi hasil namun masih tanpa target target yang kuat pada sistem adaptasi outcome.<sup>28</sup> Berdasarkan data yang ada dan merujuk data tambahan yang bersumber dari pedoman Akreditasi dari BAN-PT menegaskan bahwa, tahapan akreditasi yakni tahap pertama, akreditasi kelembagaan fokus pada masalah input yang menjadi isu penting untuk menentukan tinggi-rendahnya mutu sebuah produk (lulusan/sarjana). Input mencakup enrollment (mahasiswa), karakteristik pendidikan tenaga akademik (S-2, S-3), sumber daya finansial, fasilitas, program, dan dukungan pelayanan. Masalah input ini amat krusial, sebab berpengaruh langsung terhadap kualitas outcome. Produk yang akan dihasilkan sangat bergantung pada bahan mentah (raw material) yang diserap. Untuk bisa memperoleh status akreditasi yang baik, sebuah perguruan tinggi harus (1) menata sistem/pola rekrutmen dan seleksi mahasiswa; (2) meningkatkan mutu tenaga akademik dengan memberi kesempatan mengikuti pendidikan pascasarjana sampai tingkat doktor; (3) menggali dan mengembangkan sumber pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan badan-badan usaha swasta dalam bentuk pengembangan riset-riset strategis; (4) menyediakan sarana dan prasarana fisik yang memadai dan fasilitas yang mendukung, terutama perpustakaan dan laboratorium; (5) menawarkan program-program akademik yang menarik minat masyarakat; dan (6) memberikan pelayanan publik yang baik.

Tahap kedua, proses transformasi adalah suatu tahapan pengolahan input melalui suatu proses belajar-mengajar di kampus. Proses belajar-mengajar merupakan wahana

---

<sup>28</sup>Informasi melalui wawancara menggunakan handphone dan WA dengan para penentu kebijakan di IAKN AMBON juga adaptasi data secara menyeluruh dalam lingkup Kampus STAKN Toraja.

transfer pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu membuat suatu desain program yang bagus, terutama menyangkut masalah input, substansi program, dan metode implementasi program. Agar proses pembelajaran berlangsung efektif, harus didukung pula dengan sistem pendataan yang baik untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan mengolah umpan-balik di dalam proses pembelajaran. Perguruan tinggi juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas akademik, kegiatan ilmiah, dan pelatihan-pelatihan intelektual, yang berorientasi pada peningkatan mutu. Sebagai sebuah lembaga ilmiah, perguruan tinggi harus menjadi wadah semacam *candradimuka*, tempat bagi seluruh civitas *academica* untuk mengembangkan segenap potensi keilmuan, memupuk kreativitas, dan melakukan riset-riset inovatif guna meraih prestasi akademik yang cemerlang.

Tahap ketiga, output, merupakan produk dari serangkaian proses akademik yang berlangsung dalam sistem pembelajaran di kampus. Kualitas sebuah output dapat dilihat dari (i) prestasi akademik mahasiswa; (ii) tingkat kelulusan, drop-out, dan kegagalan mahasiswa dalam menyelesaikan studi; (iii) kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan setelah lulus; dan (iv) cepat-lambatnya lulusan (*sarjana*) mendapatkan pekerjaan (*duration of searching jobs*) dan prestasi mereka selama bekerja.

Ketiga tahapan di atas terjalin dalam satu lingkaran mata rantai yang bersambung, bersifat mutualistik, saling bersinergi, dan dibingkai dalam apa yang disebut *benchmarking* terutama dengan perguruan tinggi dalam satu kawasan. Bagi sebuah perguruan tinggi, *benchmarking* merupakan hal yang amat penting untuk membangun keunggulan komparatif, sehingga dapat bersaing di tengah kompetisi yang ketat dengan menawarkan program yang bermutu kepada publik. Berdasarkan *benchmarking* itu, perguruan tinggi di Indonesia harus bekerja secara optimal dengan mengembangkan

seluruh potensi, energi, dan sumber daya yang dimiliki, untuk mencapai standar mutu yang baik sehingga memuaskan masyarakat.

Menyoal tentang kesiapan Perguruan Tinggi dalam lingkup PTKKN untuk memberlakukan Outcome Based Education sebagai kelanjutan dari tahapan output, sebagaimana penerapan sistem akreditasi BAN-PT, maka dapat dikatakan bahwa kesiapan tersebut masih dalam posisi belum dipersiapkan sebaik mungkin, hanya saja, sejalan dengan upaya BAN-PT menegaskan OBE dalam instrumen akreditasi, dalam hal ini semua PT dalam lingkup PTKKN telah melaksanakan Outcome Based Curriculum berbasis KKN1 meskipun masih dalam taraf perbaikan dan penyesuaian yakni dengan menerapkan prinsip CPL (capaian pembelajaran lulusan). Hal inilah yang menjadi parameter penting dalam OBE yakni capaian pembelajaran outcomes. Asesmen dan evaluasi pencapaian pembelajaran merupakan basis penjaminan mutu dan perencanaan strategi akademik. STAKN Toraja dalam beberapa waktu secara khusus dalam upaya merevisi visi misi khususnya prodi baru, telah menentukan pengkajian secara menyeluruh pada perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan pendidikan, mulai dari penentuan profil lulusan, penentuan capaian pembelajaran, perancangan kurikulum, asesmen capaian pembelajaran, evaluasi, dan tindakan perbaikan berkelanjutan. Secara khusus berdasarkan kesiapan beberapa prodi yang baru ajukan akreditasinya berusaha mengimplementasikan dalam bentuk kurikulum dan perangkat pendukungnya berbasis KKNI. Meskipun belum sepenuhnya terlaksana dalam keutuhan prinsip Kurikulum “Outcomes Based Education”, setidaknya telah ada upaya signifikan yang dihasilkan yakni Kurikulum yang mengacu “Outcomes Based Education”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, secara menyeluruh dari 7 Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang ada, diakui bahwa belum semua menjalankan secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi yang outcome based

education, orientasi input, proses dan output sudah menjadi kekuatan dalam meramu setiap tahapan tersebut menjadi keutuhan outcome based education. Kurikulum yang menjadi bagian integral dari outcome based education yang didasarkan pada KKNI (kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) megaskan bahwa kurikulum KKNI sudah memenuhi prinsip mendasar dari outcome based education. Untuk penerapan kurikulum KKNI, semua PT dalam lingkup PTKKN telah melaksanakan tuntutan penyelenggaraan pembelajaran yang outcome based, namun menyangkut hal lainnya sehubungan dengan outcome based education, masih terus diupayakan.